

Anak Akidi Tio Kembali Jalani Tes Kejiwaan Terkait Kasus Sumbangan Bodong Rp 2 Triliun

PALEMBANG (IM) - Kasus hibah bodong Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio belum juga menemui titik terang. Kabar terbaru, anak Akidi Tio, Heryanty, menjalani tes kejiwaan di rumah sakit di Palembang.

"Dia kan sering kena gangguan kesehatan, jadi diperiksa saja kesehatannya," ucap Dirreskrim Polda Sumsel, Kombes Hisar Si-allang, saat ditanyai soal perkembangan kasus sumbangan bodong Rp 2 triliun, Rabu (8/9).

Dia mengatakan Heryanty diobservasi di rumah sakit. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang bersangkutan. "Sedang diobservasi di rumah sakit untuk mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya," ujar Hisar saat ditanyai soal informasi Heryanty dirawat di rumah sakit jiwa.

Kondisi kejiwaan anak Akidi Tio, Heryanty, pernah diperiksa pada Jumat (6/8). Namun, hasilnya belum disampaikan.

Hisar mengatakan belum ada perkembangan terkait status hukum Heryanty. Dia menyeb polsi masih menyelidiki dugaan hibah bodong Rp 2 triliun dan laporan dugaan penipuan terhadap seorang dokter bernama Siti Mirza.

"Statusnya masih penyelidikan baik dalam kasus Rp 2 triliun maupun dalam kasus penipuan yang dilaporkan Siti Mirza," tuturnya.

Janji sumbangan sebesar Rp 2 T ini diterima oleh Irjen

Eko Inda Heri, yang saat itu menjabat Kapolda Sumsel, dari keluarga Akidi Tio secara simbolis pada Senin (26/7/2021). Dana hibah itu ditujukan untuk penanganan COVID-19.

Pemberian dana hibah triliunan rupiah itu disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Dandrem Garuda Dempo (Gapo) Brigjen TNI Jauhari Agus. Pemberian itu merupakan keluarga pengusaha asal Aceh, almarhum Akidi Tio, yang diwakili oleh anaknya, Heryanty.

"Dana tersebut diberikan salah seorang keluarga yang saya kenal sewaktu masih tugas di Aceh. Dan sekarang dia ingin membantu warga Sumsel yang terdampak COVID-19," kata Irjen Eko Indra, Senin (26/7).

Irjen Eko mengaku mengenal keluarga Akidi Tio saat dirinya bertugas di Aceh Timur. Saat itu Eko menjabat Kasat Reskrim Polres Aceh Timur. Belakangan, dana Rp 2 triliun itu tak kunjung cair. Polisi kemudian memeriksa Heryanty pada Senin (2/8). Hasilnya, dana Rp 2 triliun yang dijanjikan dalam bentuk bilyet giro itu tak ada. Hal senada juga disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sampai hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8). ● lus

154 Kendaraan Ditilang Selama Sepekan Ganjil Genap Jakarta

JAKARTA (IM) - Kebijakan sanksi tilang bagi pelanggar ganjil-genap di Jakarta telah berlangsung selama sepekan. Sebanyak 154 pelanggar ditindak polisi.

"Ada 154 (pelanggaran yang ditindak)," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Rabu (8/9).

Sambodo mengatakan seluruh tilang bagi pengendara yang melanggar ganjil-genap itu dilakukan secara manual. Angka itu merupakan akumulasi pelanggaran dari tiga titik lokasi ganjil-genap di Jakarta.

Dari data sepekan terakhir, lokasi ganjil-genap di Rasuna Said menjadi titik pelanggaran terbanyak.

"Sudirman 58 pelanggaran, Thamrin 55, dan Rasuna Said 61," ujar Sambodo.

Sanksi tilang bagi pelanggar ganjil-genap diketahui mulai berlaku sejak 1 September 2021. Para pelanggar ditindak atas pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 287 soal pelanggaran rambu.

Para pelanggar tersebut dikenai sanksi tilang Pasal 287 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sanksi denda tilang atas pelanggaran tersebut maksimal Rp 500 ribu.

Bunyi Pasal 287 ayat (1): "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Sambodo mengatakan semua mobil berpelat hitam wajib mematuhi aturan ganjil-genap. Mobil dinas berpelat hitam tetap akan dikenai sanksi tilang jika kedapatan melanggar di kawasan ganjil-genap.

"Aturan ganjil-genap ini berlaku pada semua pelat hitam. Baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas yang menggunakan pelat hitam," terang Sambodo.

Selain itu penindakan bagi pelanggar ganjil-genap dilakukan dengan dua cara, yakni tilang manual dan tilang elektronik (e-TLE). Bagi pelanggar ganjil-genap yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran akan disinkronkan dengan data e-TLE.

Petugas kemudian akan mengirimkan surat tilang ke alamat rumah pelanggar sesuai dengan data kendaraan yang melanggar.

"Nanti kita lihat, kalau ada pelanggar ganjil-genap yang ketangkap oleh petugas, nanti kalau dia sudah ditilang secara manual tentu ditilang secara e-TLE tidak kita kirimkan," tutur Sambodo.

Namun, jika pelanggar itu tidak tertangkap tangan oleh petugas, penindakan dilakukan secara elektronik (via e-TLE). Hasil tangkap layar kamera e-TLE jadi bukti untuk kemudian dikirimkan juga surat tilang ke alamat identitas pemilik kendaraan.

"Tapi kalau kita lihat datanya dia tidak ditilang secara manual tapi ter-capture oleh e-TLE, maka hasil capture-an itu akan kita kirimkan ke pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan



MENKUMHAM TINJAU LAPAS TANGERANG YANG TERBAKAR

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) meninjau Blok C 2 tepat terjadinya kebakaran di Lapas Dewasa Klas 1 A Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9) dini hari.

Bareskrim Bantu Olah TKP Kebakaran Lapas Tangerang yang Menewaskan 41 Orang

Tim Disaster Victim Indentification (DVI) Mabes Polri dikerahkan untuk mengidentifikasi 41 korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Rabu dini hari.

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri membantu proses olah TKP kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, yang memakan korban jiwa cukup banyak, yakni 41 orang dan puluhan korban mengalami luka-luka.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan bahwa, jajarannya melalui tim Laboratorium Forensik

(Labfor), bakal membantu atau memback-up proses olah TKP, untuk mendalami penyebab kebakaran tersebut.

"Sudah diarahkan untuk backup olah TKP-nya," kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (8/9).

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, tim

Labfor nantinya akan melakukan olah TKP untuk mencari penyebab terjadinya amuk si jago merah tersebut.

"DVI (tim Labfor dikerahkan olah TKP)," ujar Argo saat dikonfirmasi terpisah.

Selain itu, tim Disaster Victim Indentification (DVI) Mabes Polri dikerahkan untuk mengidentifikasi 41 korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang.

"DVI juga diturunkan," ucap Argo.

Diketahui, kebakaran hebat melanda Lapas Kelas I Tangerang, sekira pukul 01.50 WIB, dini hari tadi. Sebanyak 41 orang menjadi korban tewas

akibat kebakaran tersebut.

Sementara sejumlah orang yang mengalami luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Posko Crisis Center

Keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang mulai berdatangan mengunjungi posko crisis center untuk menanyakan informasi terkait kondisi warga binaan yang menjadi korban. Diketahui, sebanyak 41 warga binaan meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

Salah satu keluarga warga binaan yaitu Djunaidi menuturkan, dia mengetahui adanya kebakaran di Lapas tersebut setelah melihat berita di televisi.

Dia meminta informasi ke posko krisis center karena kerabatnya berada di blok C2. "Saya dapat kabar di TV tadi, langsung ke sini untuk cari informasi. Tadi cuma didata sama petugas. Kalau sudah jelas nanti mereka kasih kabar," tuturnya. ● lus

ujar Djunaidi, Rabu (8/9).

Sementara itu, Humas dan Protokol Dirjen Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan, hingga saat ini para korban meninggal dunia masih terus diidentifikasi. Untuk korban yang selamat dengan luka ringan sudah dirawat di Klinik Lapas.

"Dari kebakaran itu, terdapat 41 warga binaan yang meninggal dunia, 8 orang dirawat di rumah sakit umum daerah, dan 31 orang dirawat di Klinik di Lapas 1 Tangerang. Sisanya, kami tempatkan sementara di masjid di lingkungan lapas 1 Tangerang," ujar Rika.

Sementara itu, posko krisis center dan juga posko Ante Mortem di Lapas Kelas 1 Tangerang dibuka selama 24 jam untuk memudahkan keluarga warga binaan dalam mencari informasi.

"Posko kita buka selama 24 jam untuk keluarga silakan datang, dan kami juga membuka hotline di nomor 081383557758," tuturnya. ● lus

Polri Hormati Langkah Yahya Waloni yang Ajukan Permohonan Praperadilan

JAKARTA (IM) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Polri menghormati langkah hukum pengacara Yahya Waloni yang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Argo mengatakan, praperadilan merupakan hak tiap tersangka yang tengah berproses dalam hukum. Saat ini, Yahya Waloni berstatus sebagai tersangka dugaan perkara penistaan agama.

"Hak dari tersangka," kata Argo saat ditanyai wartawan di Jakarta, Rabu (8/9).

Argo mengatakan, penyidik Polri siap mendengarkan keberatan yang diajukan tersangka di pengadilan. Pengadilan yang nantinya akan memutuskan apakah penegakan hukum terhadap Yahya Waloni sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti kita uji di pengadilan," ucapnya.

Abdullah Alkatiri, kasa hukum tersangka penista agama, Yahya Waloni, mendaftarkan permohonan praperadilan

ke PN Jakarta Selatan atas penangkapan dan penahanan terhadap kliennya pada 6 September 2021.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap Yahya Waloni tidak sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri.

"Seperti yang kita ketahui, Ustadz Yahya Waloni ditersangkakan dan ditangkap tanpa adanya pemanggilan dan pemeriksaan pendahuluan seperti yang diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri sendiri," kata Abdullah.

Yahya ditangkap penyidik Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan terhadap Yahya dilakukan berdasarkan LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM tanggal Selasa 27 April 2021.

Yahya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan Kitab Injil dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan Pasal 156a KUHAP. ● lus

Kapolri Tekankan Penguatan Prokes dan Percepatan Vaksinasi Covid-19



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau vaksinasi di SMAN 1 Pontianak, Kalbar.

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung serbuan vaksin di wilayah Kalimantan Barat yang digelar di dua tempat yaitu di Ayani Mega Mall dan SMAN 1 Pontianak, Rabu (8/9).

Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menekan laju pertumbuhan Covid-19 dengan berbagai langkah. Misalnya dari segi pengendalian yaitu melakukan strategi penerapan PPKM Level 1 hingga 4.

Mantan Kapolda Banten ini mengingatkan, beberapa wilayah di Kalbar yang level PPKM-nya telah turun harus tetap diimbangi dengan penguatan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Karena, Kapolri menekankan, turunnnya level PPKM pasti diiringi dengan pelanggaran aktivitas masyarakat.

"Kami memantau di wilayah Kalbar saat ini ada 10 wilayah yang masuk PPKM Level 3 dan empat wilayah Level 2, sehingga tentunya diimbangi adanya pelanggaran aktivitas masyarakat. Tentunya dengan pelanggaran tersebut ada potensi akan meningkatkan laju pertumbuhan Covid sehingga mau tak mau strategi yang dilaksanakan bagaimana menguatkan Prokes," kata Kapolri dalam tinjuannya.

Disisi lain, lanjutnya, bagaimana upaya mempercepat vaksinasi. Sehingga

dengan begitu, masyarakat mendapat kekebalan dari serangan virus corona. Karena vaksin ini, Sigit menekankan, merupakan kunci dalam pengendalian Covid sekaligus modal dasar dalam hidup berdampingan dengan virus tersebut.

Terkait hal ini, Kapolri meminta agar jajaran Forkompinda Kalimantan Barat agar lebih aktif dalam mengakselerasikan percepatan vaksinasi.

"Nanti kami komunikasi agar kiriman dan distribusi vaksin ke Kalbar akan ditingkatkan sehingga pencapaian persentase yang saat ini berada di angka 19 persen bisa meningkat dan sama capaian yang dilaksanakan secara nasional," tekan mantan Kabareskrim ini.

Terkait dengan tinjuannya di SMAN 1 Pontianak, Kapolri menyebut bahwa, dengan penguatan proses vaksinasi, akan memperkuat kesiapan dan proses kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal itu tentunya harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat disiplin atau ketat.

"Vaksinasi pelajar diharapkan dapat memperkuat kesiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan menjadikan vaksin sebagai persyaratan bagi pelajar, guru maupun perangkat sekolah. Vaksinasi di lokasi pendidikan seperti ini juga diharapkan dapat menjadi

sentra vaksinasi bagi orang tua murid maupun warga sekitar sebagai upaya akselerasi vaksinasi sehingga segera mencapai target capaian," papar Kapolri.

Tidak lupa, Kapolri mengingatkan meskipun telah mendapat dosis vaksin, masyarakat agar tetap mematuhi Prokes dan mendownload aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya pemantauan setiap kegiatan masyarakat.

Serbuhan vaksinasi di Ayani Mega Mall sendiri menargetkan 1.600 masyarakat, sementara di SMAN 1 Pontianak ditargetkan 1.100 pelajar mendapat dosis vaksin.

Kapolri menjelaskan, berdasarkan data dari Kemkes RI tanggal 7 September 2021 pukul 18.00 WIB, capaian vaksinasi nasional yaitu 33,04 persen dosis 1 dan 18,94 persen dosis 2, dengan total sasaran vaksinasi sebanyak 208,3 juta orang. Sedangkan capaian vaksinasi Provinsi Kalimantan Barat yaitu 19,20 persen dosis 1 dan 11,58 persen dosis 2 dengan total sasaran sebanyak 3,8 juta orang.

"Melihat capaian tersebut, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari bersama berbondong-bondong meluangkan waktu untuk melaksanakan program vaksinasi di tempat-tempat yang telah disediakan agar kekebalan komunal dapat segera terwujud," kata Kapolri. ● tom



OPERASI PEMUSNAHAN LADANG GANJA

Direktur Narkotika Deputy Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Aldrin Hutabarat (kiri), Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Arm Oke Kristiyanto (kedua kiri) bersama jajaran membakar pohon ganja siap panen saat operasi pemusnahan ladang ganja di Desa Teupin Rusep, Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Rabu (8/9). Dalam operasi gabungan BNN, TNI dan Polri itu ditemukan 13.000 lebih batang pohon ganja atau setara 6,5 ton ganja di atas lahan dua hektar yang kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sebagai wujud aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).